

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

MEMORANDUM
NOMOR : 203/PSDKP.2/TU.140/I/2024

Yth. : Direktur Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
Hal : Laporan Kinerja Direktorat POA Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) paket dokumen
Tanggal : 15 Januari 2024

Sehubungan dengan pengukuran kinerja lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada tahun 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jumlah Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tahun 2023 sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Manajerial.
2. Pengukuran indikator mengacu pada formula perhitungan / informasi indikator kinerja sebagaimana revisi terakhir yaitu pada November 2023.
3. Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh indikator kinerja lingkup Direktorat POA telah mencapai target yang ditetapkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **111,15%** rincian sebagaimana **Lampiran 1**.
4. Selanjutnya, hasil pengukuran dimaksud, telah kami susun menjadi Laporan Kinerja Direktorat POA Tahun 2023 sebagaimana **Lampiran 2**.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan dan arahan Bapak Direktur Jenderal kami diucapkan terima kasih.



Pung Nugroho Saksono

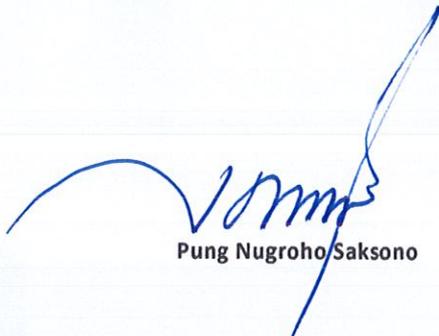
Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

TAHUN ANGGARAN : 2023
 KEMENTERIAN/LEMBAGA: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
 NKO 111,15%

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
					2023	DESEMBER	DESEMBER		s/d DESEMBER	s/d DESEMBER	
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120,00			120,00	
1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat						112,63			112,63	
2	Indeks Pengelolaan Sistem Pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	100,00	120,00	80,00	100,00	120,00
3	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,00	77,00	85,48	111,01	77,00	85,48	111,01
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan	Indeks	Maximize	Rata-rata	80,00	80,00	94,21	117,76	80,00	94,21	117,76
5	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						106,80			106,93	
6	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93,00	93,00	98,72	106,15	186,00	196,57	105,68
7	Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87,60	87,60	95,40	108,90	87,60	95,40	108,90
8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Indeks Keselapan Awak Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70,00	70,00	93,76	120,00	70,00	93,76	120,00
10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						104,07			102,87	
11	Persentase Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00
13	Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Rata-rata	80,00	80,00	80,00	100,00	160,00	173,47	108,42
14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	100,00
15	Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1,00	1,00	3,00	120,00	1,00	3,00	120,00
16	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP						113,32			113,32	
17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00
18	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	78,00	78,00	91,23	116,96	78,00	91,23	116,96
19	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,50	80,50	87,75	109,01	80,50	87,75	109,01
20	Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	75,00	75,00	100,00	120,00	75,00	100,00	120,00
21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	99,40	99,40	99,85	100,45	99,40	99,85	100,45
22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	21,00	21,00	28,03	120,00	21,00	28,03	120,00
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Rata-rata	92,00	92,00	133,33	120,00	182,00	242,66	120,00
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	100,00	120,00	77,50	100,00	120,00
25	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77,50	77,50	93,48	120,00	77,50	93,48	120,00

Sumber: <https://kinerjaku.kkp.go.id>



Pung Nugroho Saksono



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA TAHUN 2023



DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP

Kata Pengantar

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pencapaian Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

pada Tahun 2023.

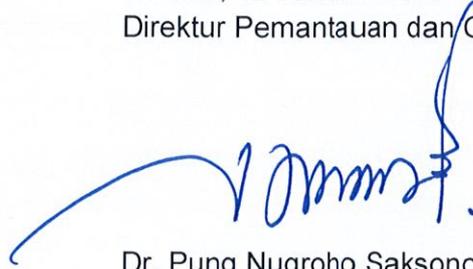
Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2023 telah diupayakan melalui pelaksanaan progam Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; (2) Operasional Pusat Pengendalian; (3) Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan (4) Operasional Armada dan Perawatan. Sampai dengan Tahun 2023 kinerja Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada telah berhasil mencapai kinerja strategis yang menjadi perhatian publik dalam hal operasi kapal pengawas, pengembangan teknologi, perbaikan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur pengawasan.

Akhir kata, semoga LKj ini dapat bermanfaat untuk perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggung jawaban serta akuntabilitas Direktorat Pemantuan dan Operasi Armada pada Tahun 2023. Keberadaan laporan ini tidak hanya untuk memenuhi kewajiban namun sebagai upaya perbaikan terus menerus di Direktorat

Pemantauan dan Operasi Armada dengan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja untuk triwulan

berikutnya dan dimasa mendatang agar menjadi lebih baik.

Jakarta, 12 Januari 2024
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Direktorat POA

1. Ema Velayati, S.St.Pi
2. Ikrom Bungsu, S.Pi
3. Vandra Anggriawan, SH
4. Hamzah Abdulloh, A.Md

Kontributor Pelaporan Direktorat POA

1. Arseto Rahadyawan, ST
2. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
3. Bilmantasya Al Fattha, ST
4. Nova Roy Yohana, S.Sos
5. Noval Reza Jaya, A.Md
6. Husain, S.Kom

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Tim Penyusun.....	4
Daftar Isi.....	5
Daftar Tabel	6
Daftar Gambar.....	7
Daftar Lampiran.....	8
Ringkasan Eksekutif	9
BAB I.....	14
Pendahuluan	14
Latar Belakang	15
Maksud dan Tujuan	16
Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023.....	17
BAB II.....	24
Perencanaan Kinerja	24
RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024	25
KEBIJAKAN EKONOMI BIRU	28
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada.....	30
Perjanjian Kinerja Dit. POA.....	31
ALOKASI ANGGARAN.....	34
BAB III.....	35
Akuntabilitas Kinerja	35
Pengukuran Capaian Kinerja	36
Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	38
Realisasi Anggaran	79
BAB IV	82
Penutup.....	82
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	83
LAMPIRAN.....	84

Daftar Tabel

Tabel 1. Target dan Realisasi IKU-1 Tahun 2023	40
Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-2 Tahun 2023	41
Tabel 3. rincian per komponen IKU 1	41
Tabel 4. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023	42
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 3 Periode Tahun 2023	44
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 4 Periode Tahun 2023	45
Tabel 7. Hasil survey kepuasan masyarakat	46
Tabel 8. Hasil capaian kinerja IKU 5 periode tahun 2023	47
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 6 Periode Tahun 2023	48
Tabel 10. Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA Tahun 2023	51
Tabel 11. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP	52
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 8 Periode Tahun 2023	53
Tabel 13. Rincian Komponen IKU 8 Periode Tahun 2023	53
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 9 Periode Tahun 2023	55
Tabel 15. Komponen penilaian Kesiapan Awak kapal pengawas	55
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 10 Periode Tahun 2023	56
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 11 Periode Tahun 2023	58
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 12 Periode Tahun 2023	59
Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKL	60
Tabel 20. Rincian Pemeliharaan Sarana Pengawasan	61
Tabel 21. Rincian Pemeliharaan Sarana Pengawasan	62
Tabel 22. Rincian Pembangunan Prasarana di UPT	63
Tabel 23. Target dan realisasi IKU-14 periode Tahun 2023	63
Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode Tahun 2023	64
Tabel 25. Target dan realisasi IKU 16 periode Tahun 2023	65
Tabel 26. Target dan Realisasi IKU 17 Periode Tahun 2023	68
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU-18 Periode Tahun 2023	69
Tabel 28. Target dan realisasi IKU 19 periode Tahun 2023	70
Tabel 29. Target dan realisasi IKU 20 periode Tahun 2023	71
Tabel 30. Rincian Tindakanlanjutan Rekomendasi Hasil Pengawasan	72
Tabel 31. Target dan realisasi IKU 21 periode Tahun 2023	72
Tabel 32. Rincian target dan realisasi IKU-22 periode Tahun 2023	73
Tabel 33. Target dan realisasi IKU 23 periode Tahun 2023	75
Tabel 34. Target dan realisasi IKU 24 periode Tahun 2023	77
Tabel 35. Target dan realisasi IKU-25 periode Tahun 2023	77
Tabel 36. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Tahun Tahun 2023	79

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA	21
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	31
Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2023	36
Gambar 4 Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas.....	39
Gambar 5 Pesawat Patroli	49
Gambar 6 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas	52
Gambar 5 Pengesahan dan Hasil Penilaian oleh BKI.....	60

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	85
Lampiran 2 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli	91
Lampiran 3 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas	102

Ringkasan Eksekutif

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) periode Tahun 2023. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2023 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud. Direktorat POA telah menetapkan 5 Sasaran Kegiatan dan 25 Indikator Kinerja (IK). Capaian kinerja Direktorat POA untuk Tahun 2023 mencapai 111,15% mengalami kenaikan sebesar 2.03% dari capaian triwulan tahun IV 2022 sebesar 109,12%. Dalam hal pelaksanaan anggaran, Direktorat POA telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) yang tertuang dalam RKA-K/L Satker Sekretariat Ditjen PSDKP tahun 2023. Dengan Pagu Direktorat POA sebesar Rp 484,456,097,000 (empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun 2023 sebesar Rp 483.721.298.962 (empat ratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 99,85% dari Pagu anggaran.

Dalam merealisasikan anggaran, Direktorat POA mengacu pada prinsip *budget follow program* secara efektif dan efisien. Artinya, setiap anggaran yang dikeluarkan harus mendukung pencapaian indikator kinerja lingkup Direktorat POA. Adapun dalam meningkatkan pencapaian kinerja organisasi serta memastikan setiap indikator kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada senantiasa melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin sehingga berbagai kendala dalam pencapaian kinerja dan tindaklanjutnya dapat diantisipasi dan disiapkan mitigasinya.

Realisasi pencapaian indikator kinerja Direktorat POA periode Tahun 2023, ditabulasikan pada Tabel 1 berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	
01 Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	01 Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	80	100	125.00	
	02 Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	02 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	80	100	125.00
		03 Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	77	85.48	111.01
		04 Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	80	94.21	117.76
	05 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP	100	100	100.00	
03 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	06 Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93	98.72	105.68	
	07 Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6	95.4	108.90	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
	08 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	100	100	100.00
	09 Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	70	93.76	133.94
	10 Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	100	100	100.00
04 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11 Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	100	100	100.00
	12 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	100	100	100.00
	13 Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80	80	100.00
	14 Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80	80	100.00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
05 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	15 Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	1	3	300.00
	16 Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	100	100	100.00
	17 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	100%	100%	100.00
	18 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA	78	91.23	116.96
	19 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	80.5	87.75	109.01
	20 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75%	100%	133.33
21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup		99.4%	99.85%	100.45

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
	Direktorat POA			
	22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	21	28.03	133.48
	23 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	92%	133,33%	144.57
	24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	77.5%	100%	129.03
	25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	77.5%	93.48%	120.62

Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA

111.15

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam Pembangunan kelautan dan perikanan. Peran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan. Pilar pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan semakin kuat, saat ini kewenangan yang dimiliki yaitu pemantauan dan pengawasan, penegakan hukum dan pemberian sanksi administrasi dibidang kelautan dan perikanan.

Salah satu kunci keberhasilan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut yaitu memerlukan peran dan kinerja dari unit kerja yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA). Ruang lingkup tugas dari Direktorat POA meliputi penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, penyiapan logistik dan operasi kapal pengawas, pengoperasian kapal pengawas dan pesawat patroli, pemantauan dan penyelenggaraan pusat pengendalian serta pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas. Ukuran kinerja tersebut dengan jelas ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat POA.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan manajemen kinerja yang meliputi: aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA yang menginformasikan capaian kinerja selama Tahun 2023. Keberadaan laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk memberikan umpan balik perbaikan dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat POA Tahun 2023 disusun dengan tujuan yaitu:

1

Penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh stakeholder dan masyarakat kelautan dan perikanan.

2

Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2023

A. Tantangan Pengawasan SDKP

Tantangan pengawasan dan penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan dilaut saat ini semakin kompleks serta datangnya tidak dapat diprediksi, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor: A/RES/63/111 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2008, ada 5 (lima) ancaman keamanan di laut dan salah satunya yaitu kegiatan *IUU fishing*. Selama ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar dari kegiatan IUUF, dibuktikan dengan jumlah kapal IUUF yang ditangkap oleh kapal pengawas KKP selama kurun waktu tahun 2007-2022 yaitu sebanyak 2112 kapal terdiri dari kapal kapal ikan berbendera asing maupun berbendera Indonesia. IUU fishing merupakan kegiatan yang tersembunyi, multidimensi serta sulit untuk diprediksi, kegiatan penangkapan ikan bersifat lintas negara sehingga sulit untuk mengidentifikasi aktor yang membiayai maupun pemiliknya.

Kondisi ini memerlukan perubahan dalam strategi pengawasan SDKP dengan mengandalkan teknologi informasi agar pengawasan lebih efektif dan efisien. Tuntutan penggunaan teknologi dalam pengawasan SDKP tidak bisa ditawar-tawar lagi, sudah sepatutnya kita menggunakan perkembangan teknologi komputasi digital, internet, cloud computing, *artificial intelligent* (AI), *big data* serta *Internet of Thing* (IoT). Modernisasi armada pengawasan juga menjadi kebutuhan, saat ini armada kapal pengawas 60% sudah berumur diatas 10 tahun dengan daya jelajah yang terbatas dan kemampuan serta kehandalan dalam melakukan pengawasan di laut juga sangat terbatas sehingga perlu untuk melakukan peremajaan kapal pengawas yang baru dan lebih modern. Modernisasi juga diperlukan untuk prasarana pengawasan dengan tuntutan pengawasan SDKP di UPT Pengawasan yang semakin kompleks maka keberadaan prasarana pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

Kementerian kelautan dan Perikanan mulai tahun 2022 telah menetapkan kebijakan penangkapan ikan terukur, Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan berbasis *output control* (kuota per kapal), dengan pembagian kuota untuk nelayan lokal, kuota bukan untuk tujuan

komersial (diantaranya diklat, litbang, kesenangan dan wisata), serta kuota untuk industri, salah satu faktor kunci keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan upaya pengawasan di laut (while fishing) untuk memastikan bahwa pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Perkembangan harga BBM dunia terus mengalami kenaikan, kondisi ini mengakibatkan hari operasi kapal pengawas terkoreksi dan menjadi berkurang dari yang direncanakan sehingga dengan kemampuan frekuensi operasi kapal pengawas tersebut maka pengawasan dilaut perlu diintegrasikan dengan VMS atau dengan operasi udara.

Tantangan berikutnya yang tidak kalah penting yaitu lahirnya PP Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, kondisi tersebut menuntut instansi yang memiliki kapal pengawas dilaut untuk bersinergi baik ditingkat pengambil keputusan maupun ditingkat operasional lapangan.

B.Isu - Isu Strategis

B.1. Peran Pokmaswas

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dengan jumlah pulau mencapai 17.506 pulau, luas laut sekitar 5,8 juta km² dan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 km. Berdasarkan wilayah dan lautan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdaya kelautan dan perikanan. Maka dari itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat diantara berbagai pihak untuk menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Bangsa Indonesia telah memiliki rasa tanggungjawab terhadap upaya menjaga kekayaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal tersebut tercermin dalam warisan adat dan budaya yang mendukung kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan seperti Awig-awig di Bali dan NTB, Sasi di Maluku, Panglima Laot di Aceh, dan sebagainya sebagai upaya pemberdayaan sumberdaya alam.

Kelestarian sumber daya dapat diwujudkan sepanjang semua pihak bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dengan menaati kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang melandasinya. Pokmaswas merupakan sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISMASWAS) adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab agar dapat diperoleh manfaat secara berkelanjutan tertuang di Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Adapun beberapa kegiatan Pokmaswas seperti melakukan pengawasan di laut dan di perairan darat serta membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kegiatan pengawasan.

Kementerian kelautan serta pihak terkait lainnya berusaha untuk melakukan peningkatan keaktifan Pokmaswas, salah satunya dengan melakukan kegiatan pembinaan Pokmaswas.

B.2. Penguatan Armada Pengawasan SDKP

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang telah menghibahkan kapal pengawas. Berdasarkan penandatanganan *Exchange of Notes* (ENs) tanggal 14 Februari 2020, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan hibah dari Pemerintah Jepang berupa 2 (dua) unit Kapal Eks. Patroli Badan Perikanan Jepang yaitu "Hakurei Maru" dan "Shirahagi Maru". Kedua kapal tersebut memiliki panjang 63 meter yang selanjutnya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal PSDKP sebagai kapal pengawas kelautan dan perikanan. Kedua kapal tersebut kini diberi nama Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan "Orca 05 dan Orca 06". Dengan spesifikasi yang memadai yaitu masuk dalam kategori Kapal Pengawas Kelas I (Panjang 60 Meter) maka kedua kapal tersebut ditempatkan untuk daerah-daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta daerah rawan penangkapan ikan secara illegal.

B.3. Sinergitas Operasi Pengawasan

Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu memiliki beragam permasalahan seperti menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi di laut seperti: Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/ Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu diperlukan sinergitas dari semua pihak, antara lain: TNI-Angkatan Laut, POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP, Kementerian Keuangan-Ditjen Bea Cukai, Badan Keamanan Laut (Bakamla). Ke-enam lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan masing-masing.

C. Tugas dan Fungsi Direktorat POA

Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada.

Direktorat POA dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh 6 (enam) Ketua Tim Kerja yaitu: (1) Tim Kerja Prasarana dan Sarana, (2) Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi dan Intelijen, (3) Pengawakan dan Logistik, (4) Pengoperasian Kapal Pengawas dan Pesawat Patroli (5) Pemeliharaan dan Perawatan Kapal Pengawas, (6) Dukungan Manajerial. Struktur Organisasi sebagaimana **Gambar 1**.

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat POA



Adapun Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada memiliki beberapa fungsi sebagai berikut

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian

- pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 4. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Direktorat.

D. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2023 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2020- 2024 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2023.

Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2023.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2023 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang

BAB II

Perencanaan Kinerja

RENSTRA DITJEN PSDKP TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Koordinator dan Sub Koordinator lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - Operasi bersama pengawasan di laut Pertukaran data
 - Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing
 - Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, represif (ultimum remedium).
 - Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan

5. Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - Optimalisasi peranserta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar" Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan"
 - Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar
 - Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

KEBIJAKAN EKONOMI BIRU

Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan inisiatif program melalui kebijakan Ekonomi Biru. Ekonomi biru merupakan konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek, yaitu ekologi dan ekonomi. Ekonomi Biru tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem laut secara keseluruhan. Selain mengutamakan kesehatan laut, program strategis ini juga membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional melalui distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Adapun Kebijakan Ekonomi Biru terdiri atas 5 (lima) Program Turunan sebagai berikut :

➤ **Memperluas kawasan konservasi laut**

Kawasan Konservasi merupakan salah satu cara untuk menjaga laut tetap sehat karena menyediakan sarana untuk menurunkan tekanan terhadap keanekaragaman hayati laut, khususnya yang diakibatkan oleh penangkapan ikan berlebih dan kerusakan habitat akibat kegiatan manusia serta pembangunan. Kawasan konservasi laut yang dikelola dengan baik dapat memperbaiki dan bahkan meningkatkan populasi ikan, memberikan manfaat ekologis bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, mempertahankan rantai makanan tetap sehat, merawat stabilitas ekosistem, memproduksi oksigen, serta menjaga fungsi serapan karbon.

➤ **Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota**

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa komoditas sumber daya ikan di beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) memiliki status lebih tangkap karena mekanisme pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini masih menggunakan pengendalian input (*input control*) dan menerapkan penarikan pungutan perikanan pada saat pra-produksi. Penangkapan Ikan secara Terukur Berbasis Kuota adalah penangkapan ikan yang terkendali dan dilakukan berdasarkan kuota penangkapan ikan di enam zona yang telah ditentukan. Hal ini dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan

pertumbuhan ekonomi nasional.

➤ **Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan**

Mengurangi tekanan sumber daya ikan di laut, melalui pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan. Kebijakan pengembangan perikanan budi daya yang akan dilakukan berbasis komoditas orientasi ekspor, konsumsi dalam negeri untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Adapun komoditas unggulan dipilih berdasarkan analisis pangsa pasar, trend perkembangan produksi dan daya saing, yaitu: udang, lobster, kepiting, rumput laut dan ikan nila. Pengembangan perikanan budi daya secara umum akan dilakukan dengan dua cara yaitu revitalisasi kawasan budi daya seperti tambak rakyat/ tradisional dan implementasi modelling seperti budi daya tambak udang berbasis kawasan dan tambak udang terintegrasi.

➤ **Pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil**

Strategi dalam melaksanakan program utama pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Strategi tersebut dilakukan dengan mengurangi tekanan/dampak negatif dari kegiatan manusia; memperbaiki pulau kecil yang rusak; melindungi ekosistem pulau kecil terluar, pulau kecil kurang dari 100 km² dan pesisir; serta memenuhi fungsi pengawasan dan pengendalian.

➤ **Pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut**

Gerakan ini menekankan pada partisipasi nelayan dan dilakukan untuk mengedukasi kesadaran masyarakat sekaligus mengampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih sehingga ekosistem laut menjadi sehat. Bulan Cinta Laut mengajak nelayan untuk berperan aktif menjaga laut tetap sehat dengan mengambil sampah laut. Dalam kurun waktu satu bulan dalam satu tahun, nelayan diharapkan pergi melaut untuk mengumpulkan sampah di laut.

Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Perjanjian Kinerja Dit. POA

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil pada tahun 2023, dibuat dokumen perjanjian kinerja sebagaimana terdapat pada lampiran 1. Adapun Rincian Indikator Kinerja yang menjadi target pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

	<p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346 WEBSITE : www.kkp.go.id/djpsdkp EMAIL : diti詹psdkp@kkp.go.id</p>
<p align="center">PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Pung Nugroho Saksono Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada</p>	
<p>Selanjutnya disebut pihak pertama</p> <p>Nama : Adin Nurawaluddin Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
<p align="center">Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</p>  <p align="center">Adin Nurawaludin</p>	<p align="center">Jakarta, November 2023</p> <p align="center">Pihak Pertama Direktur Pemantauan dan Operasi Armada</p>  <p align="center">Pung Nugroho Saksono</p>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	80
		3	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80
		5	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (%)	100
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	6	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93
		7	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	70
		10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11	Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		13	Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80
		14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	1
		16	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		18	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78
		19	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	80.5
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4
		22	Nilai implementasi program budaya Kerja (Nilai)	21
		23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92
		24	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5
		25	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	484,456,097,000
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	
Total Anggaran		484,456,097,000

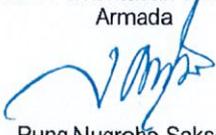
Jakarta, November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaludin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada



Pung Nugroho Saksono

ALOKASI ANGGARAN

Dalam mendukung Indikator Kinerja tersebut, dialokasikan anggaran dalam merealisasikan Rincian Output Lingkup Direktorat POA ditabulasikan sebagai berikut:

RINCIAN OUTPUT	VOLUME RO	ANGGARAN
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	5100 Produk	2,750,000,000
NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	4 NSPK	225,000,000
Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	3 Laporan	500,000,000
Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	34 Laporan	140,000,000
Operasi Kapal Pengawas	90 Hari Operasi	195,369,661,000
Operasi Pesawat Patroli	150 Operasi	42,410,000,000
Kapal Pengawas	2 Unit	206,369,061,000
Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	12 Unit	31,273,330,000
Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	1 Unit	5,419,045,000
TOTAL		484,456,097,000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar **111,15%** dengan capaian indikator Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berwarna **BIRU** dengan kategori **ISTIMEWA**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Gambar 3 Tangkapan Layar Capaian Kinerja Direktorat POA Tahun 2023

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2023	Target Desember	Capaian Desember	%	Target s/d Desember	Capaian s/d Desember	%	Tgl Input
01	Terseleenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif						120.00			120.00		
01	Nilai supervisi pembinaan Picketrawas	Nila	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	80.00	100.00	120.00	80.00	100.00	120.00	10-Jan-2024 19:17
02	Terseleenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat						112.63			112.63		
02	Indeks Pengukuran Sistem Pemantauan dan Informasi Kinerja SDKP (Data Dukung)	Indeks	Maximize	Jumlah Posisi Akhir	80.00	80.00	100.00	120.00	80.00	100.00	120.00	10-Jan-2024 15:17
03	Tingkat pembinaan peserta Bimtek Insipul Direktorat POA (Data Dukung)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77.00	77.00	83.38	111.01	77.00	88.48	111.01	10-Jan-2024 19:17
04	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Data Dukung)	Indeks	Maximize	Rata-rata	80.00	80.00	94.21	117.76	80.00	94.21	117.76	10-Jan-2024 19:17
05	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (Data Dukung)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10-Jan-2024 15:17
03	Terseleenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif						106.80			106.83		
06	Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli (Data Dukung)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	93.00	93.00	93.72	106.15	160.00	169.57	106.68	10-Jan-2024 19:17
07	Indeks Kinerja Operasi Kapal Penyusut (Data Dukung)	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	87.60	87.60	93.10	106.90	87.60	95.40	106.90	10-Jan-2024 19:17
08	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	%	Maximize	Rata-rata	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10-Jan-2024 19:17
09	Indeks Ketepatan Awak Kapal Pengawas	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	70.00	70.00	93.76	120.00	70.00	93.76	120.00	10-Jan-2024 19:17
10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (Data Dukung)	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10-Jan-2024 19:17
04	Terseleenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan						104.87			104.87		
11	Persentase Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10-Jan-2024 19:17
12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	100.00	10-Jan-2024 19:17
13	Nilai Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP	Nila	Maximize	Rata-rata	80.00	80.00	80.00	100.00	160.00	173.47	106.42	10-Jan-2024 19:17
14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP	Nila	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80.00	80.00	80.00	100.00	80.00	80.00	100.00	10-Jan-2024 19:17
15	Inovasi yang dihasilkan bidang pemantauan dan operasi armada	Inovasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	1.00	1.00	3.00	120.00	1.00	3.00	120.00	10-Jan-2024 19:17
16	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP	%	Maximize	Nilai Posisi Akhir	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	10-Jan-2024 19:17

05. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP				113,32	113,32							
17	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Rata-rata	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00	10-Jan-2024 19:17
18	Indeks Efektivitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	Indeks	Maximize	Nilai Postel Akhir	70,00	70,00	91,23	116,96	75,00	91,23	116,96	10-Jan-2024 19:17
19	Persentase Matriks SAKOP Direktorat POA	NIB	Maximize	Nilai Postel Akhir	80,50	80,50	87,75	109,01	80,50	87,75	109,01	10-Jan-2024 19:17
20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dikompas dan diimpakan	%	Maximize	Nilai Postel Akhir	75,00	75,00	100,00	120,00	75,00	100,00	120,00	10-Jan-2024 19:17
21	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Postel Akhir	99,40	99,40	99,92	100,45	99,40	99,65	100,45	10-Jan-2024 19:17
22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja "Data Dukung"	NIB	Maximize	Nilai Postel Akhir	21,00	21,00	28,10	120,00	21,00	28,03	120,00	10-Jan-2024 19:17
23	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Rata-rata	92,00	92,00	133,33	120,00	162,00	242,66	120,00	10-Jan-2024 19:17
24	Tingkat Kepuasan Pengkajian BANI Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Postel Akhir	77,50	77,50	100,00	120,00	77,50	100,00	120,00	10-Jan-2024 19:17
25	Tingkat Kepuasan Pengkajian Barang/Lasa Lingkup Direktorat POA	%	Maximize	Nilai Postel Akhir	77,50	77,50	93,46	120,00	77,50	93,46	120,00	10-Jan-2024 19:17

Sumber: kinerjaku.KKP.go.id, Desember 2023

SASARAN KEGIATAN 1

TERSELENGGARANYA SISTEM PENGAWASAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif” didukung oleh satu Indikator Kinerja Utama, yaitu: “Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas”.

1 Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas

Sistem pengawasan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini mengandalkan peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan mereka, mendeteksi potensi masalah atau ancaman, serta berkontribusi dalam penanganan situasi yang mungkin mengganggu keamanan dan ketertiban.

Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan Pokmaswas untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (Sismaswas) secara baik dan efektif. Supervisi oleh Satker Pusat untuk kegiatan pembinaan Pokmaswas yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi perlu dilakukan karena beberapa alasan berikut:

- ♦ **Koordinasi dan Pengawasan**, Supervisi oleh Satker Pusat memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi. Dengan adanya supervisi, Satker Pusat dapat memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.
- ♦ **Peningkatan Kualitas**, Supervisi dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pembinaan Pokmaswas. Satker Pusat dapat memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang diperlukan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kegiatan pembinaan

- ♦ **Monitoring dan Evaluasi**, Melalui supervisi, Satker Pusat dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dan indikator kinerja tercapai dengan baik.
- ♦ **Pengalaman dan Pengetahuan**, Satker Pusat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam pembinaan Pokmaswas. Dengan melakukan supervisi, mereka dapat berbagi pengalaman terbaik dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada Pemda Provinsi dalam melaksanakan kegiatan pembinaan

Dengan melakukan supervisi oleh Satker Pusat, diharapkan bahwa kegiatan pembinaan Pokmaswas oleh Pemda Provinsi dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas diperoleh dari kualitas kegiatan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan Pokmaswas dengan merujuk pada Komponen kegiatan yang dinilai antara lain:

Gambar 4 Komponen nilai supervisi pembinaan Pokmaswas



Tabel 1. Target dan Realisasi IKU-1 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100	125%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu dengan **Nilai 100** dari target **Nilai 80** dengan persentase capaian sebesar **125%**. Indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru serta belum terdapat pada Renstra 2020-2024.

Dengan capaian tersebut, mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal, dengan beberapa strategi yang telah dilakukan antara lain:

- 1 Penyusunan rencana kegiatan pembinaan Pokmaswas
- 2 Penyiapan Booklet Pokmaswas
- 3 Penyiapan PIN Pokmaswas
- 4 Supervisi kegiatan pembinaan pokmaswas
- 5 Pencetakan KTA Pokmaswas
- 6 Penilaian Pokmaswas Teladan Tingkat Nasiona

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 1 ini sebesar Rp140.000.000, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar RP139.051.532 atau 99,32% dari alokasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2

TERSELENGGARANYA SISTEM PEMANTAUAN SDKP YANG AKURAT

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Sistem Pemantauan SDKP yang akurat” didukung oleh 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

2 Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP

Indikator Kinerja “Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP. Direktorat POA memastikan pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan kepada user pengguna hasil analisis dilakukan secara akuntabel. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), Ditjen PSDKP. Rincian capaian IKU 2 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Target dan Realisasi IKU-2 Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP	80	100	125,00%	80	96,66	120,83%	80	93,33	117%	80	100	125%	80	100	125

Berdasarkan tabel di atas, target untuk IKU 2 dapat dicapai secara maksimal, bahkan melampaui target. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 6,67%. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu indeks 80, indikator ini telah tercapai sebesar indeks 100. Adapun indeks 100 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. rincian per komponen IKU 1

No	Indikator	Bulan												Bobot	Perhitungan			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Pengelolaan Data Kapal Perikanan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	40	40
2	Pengolahan Data Kapal perikanan di wilayah konservasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
3	Pengolahan Data Kapal Pengangkut Ikan Hidup	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
4	Bahan Operasi Kapal Pengawas dan Operasi Airborne Surveillance	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	20
	Indeks														100.00			

Indikator ini dipengaruhi oleh 4 sub indikator yaitu: Indikasi Pelanggaran, Analisis Kapal di Kawasan Konservasi, Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Data untuk Operasi Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

1. Indikasi Pelanggaran

Indikasi pelanggaran adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap kapal- kapal ikan yang terdaftar di dalam sistem pemantauan kapal perikanan berkaitan dengan berbagai indikasi pelanggaran pengelolaan sumber daya perikanan.

Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Hasil analisis tersebut lalu diterbitkan semacam laporan "Indikasi Pelanggaran" selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk diketahui, Selama periode Tahun 2023, Pusdal PSDKP telah menerbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan **sebanyak 1.683** kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian analisis pelanggaran periode Januari sd Juni 2023

No	Indikasi Pelanggaran	Bulan												Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	153	132	152	50	39	35	32	37	46	42	78	95	890
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	14	2	10	5	4	0	6	5	2	3	6	5	62
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	19	4	22	7	2	0	0	0	0	0	1	1	56
4	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	22	19	35	42	39	24	9	6	27	43	179	223	668
5	Pelabuhan Pangkal/Muat	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5
6	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kawasan Konservasi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	TOTAL	208	158	220	104	85	59	47	48	75	89	265	325	1683

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kelautan dan Perikanan, melaksanakan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia pada tahun 2023 dan terdapat 1.788 kapal berizin pusat yang terpantau melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi.

3. Analisis Kapal Pengangkut Ikan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN- KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dinyatakan bahwa setiap kapal pengangkut ikan hidup berbendera asing diizinkan masuk ke wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, sampai dengan bulan Desember 2023 Direktorat POA telah melakukan pemantauan terhadap 40 kapal pengangkut ikan hidup.

4. Data untuk Ops Kapal Pengawas/Airborne Surveillance

Penyiapan data kapal perikanan berdasarkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) dan *Automatic Identification System (AIS)* dilaksanakan dalam rangka mendukung operasi kapal pengawas dan pelaksanaan *air surveillance*. Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan penerbitan data untuk operasi kapal pengawas yang dilakukan setiap bulan.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU ini dengan capaian lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh terpenuhinya seluruh komponen sebagai upaya maksimal dari Direktorat POA khususnya Tim Kerja Pengendalian Sistem dan Informasi Intelijen Kapal Pengawas serta keterlibatan pimpinan dalam melakukan monitoring secara rutin melalui laporan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 2 ini sebesar Rp5.359.702.316,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp5.359.702.316,00 atau 98,90% dari alokasi anggaran.

3 Tingkat Pemahaman Peserta Bimtek lingkup Direktorat POA

Indikator Kinerja "Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA" bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Capaian Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test) yang peserta Bimtek berasal dari stakeholder atau para pemilik kapal perikanan. BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2023 yaitu: Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan kepada stakeholder.

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 3 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA	75	85	113,33	76	88	115,79	77	93,14	120,96%	77	85,48	111,01%	80	85,48	106,85%

Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian IKU 3 sebesar 85,48 melebihi nilai target sebesar 77 dengan persentase capaian sebesar 111,01%. Bila dibandingkan dengan periode akhir renstra dengan target nilai 80 indikator ini telah tercapai dengan presentase 106,85%, sehingga optimis dapat mencapai target akhir renstra 2024. Capaian ini mencerminkan bahwa Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh Direktorat POA dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh Stakeholder atau Pemilik Kapal Perikanan. Bimbingan Teknis yang telah dilakukan Direktorat POA periode 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

No	Waktu	Lokasi Bimtek	Nilai
1	15 Maret 2023	Bimbingan Teknis di Manado	85.22
2	13 September 2023	Bimbingan Teknis di Cirebon	86.5
3	3 November 23	Bimbingan Teknis di Sibolga	84.77
4	16 November 23	Bimbingan Teknis di Pontianak	85.43
Total			85.48

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 7,66%. Hal ini disebabkan oleh perubahan lokasi dan tingkat penguasaan teknologi gadget dari para peserta khususnya aplikasi SKAT. Sehingga, ke depan perlu dilakukan pemahaman secara lebih mendalam pada lokasi sebagai mana tersebut di atas. Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra 2024 sebesar 80 telah tercapai sebesar 85,48 dengan presentase 106,85%. Jika melihat capaian pada tahun 2020-2023, target pada Renstra 2024 berpotensi tercapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA yang tinggi dalam memastikan terlaksananya Bimtek SPKP di bidang Operasi Pusat Pengendalian;
2. Persiapan Bimtek SPKP oleh Tim Kerja Pengendalian Sistem Informasi Intelijen dilakukan secara maksimal.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 3 ini sebesar Rp287.051.000 dan sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp286.469.460 atau 99,80% dari alokasi anggaran.

4 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengisian kuesioner Sistem Kepuasan Masyarakat Layanan SPKP menggunakan digital form pada Tools Survei Kepuasan (Aplikasi SI SUSAN) KKP, dimana hasil penilaian pengguna SPKP langsung diolah secara otomatis pada Aplikasi SI SUSAN. Aplikasi SI SUSAN merupakan aplikasi yang dibangun oleh Pusdatin KKP dalam rangka untuk membantu pengambilan responden dan menghitung nilai SKM yang sesuai dengan Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SKM Secara Realtime. Indeks Kepuasan Masyarakat terdiri dari indikator kuantitatif, yakni:

1. Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Layanan penerbitan dokumen tertulis yang menyatakan bahwa transmitter SPKP pada kapal perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan.

2. Pemberian Akses Pemantauan Kapal Perikanan

Dengan adanya inovasi pengajuan secara mandiri, secara otomatis Pengguna akan mendapatkan akses untuk mengajukan layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan sekaligus untuk memantau kapal perikanan.

3. Analisis Pergerakan Kapal Perikanan

Bagi perusahaan perikanan yang memiliki keperluan khusus dalam melakukan tracking kapal perikanan dapat mengetahui posisi pergerakan kapal perikanan yang dimiliki dengan cara mengajukan permohonan pelayanan analisis kapal perikanan kepada Direktur Jenderal PSDKP.

Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 4 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan)	-	-	-	80	89,96	112,45	80	91,97	114,96%	80	94,21	117,76%	80	94,21	117,76%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 94,21 dari target sebesar 80 sehingga persentase capaian sebesar 117,76%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 2,24 dimana capaian tahun 2022 adalah sebesar 91,97. Adapun target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 yaitu sebesar 80%. Jika melihat capaian pada tahun 2020-2023, target pada Renstra 2024 berpotensi tercapai.

Tabel 7. Hasil survey kepuasan masyarakat

NO	WAKTU	LOKASI BIMBINGAN TEKNIS	NILAI
1	14 Maret 2023	Manado - Sulawesi Utara	93.75
2	15 Juni 2023	Cirebon - Jawa Barat	89.67
3	14-Sep-23	Cirebon - Jawa Barat	97
4	1-Nov-23	Sibolga - Sumatera Utara	96.42
Rata-Rata			94.21

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SPKP serta peningkatan kinerja pada tahun 2023 beberapa faktor sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi kepada pengguna SPKP;
2. Kemudahan penggunaan aplikasi;
3. Paparan oleh narasumber yang kompeten dan penyampaian materi secara jelas dan mudah dipahami.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 4 ini sebesar Rp304.220.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp303.989.423,00 atau 99,92% dari alokasi anggaran.

5 Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA Tahun 2023 telah terpenuhi. Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menstandarkan pelayanan publik Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP).

Tabel 8. Hasil capaian kinerja IKU 5 periode tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP	-	-	-	100	100	100%	100	120	120,00%	100	100	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada tahun tahun 2023 adalah sebesar 100% berdasarkan Draft Keputusan Direktur Jenderal PSDKP tentang Manual Mutu ISO 9001 : 2015. Pada tahun sebelumnya, realisasi capaian adalah sebesar 120%. Adapun penurunan 20% terjadi karena perubahan formula perhitungan dimana, tahun 2022 variabel yang dihitung jumlah draft yang diselesaikan. Sedangkan, tahun 2023 variabel yang dihitung adalah progres capaian per masing-masing komponen antara lain :

No	Tahapan Penyelesaian	Nilai	Output
1	Persiapan	15	a. Identifikasi substansi b. Outline c. Zero draft
2	Pelaksanaan	70	a. Pembahasan draft b. Uji publik draft c. Draft yang siap ditindaklanjuti untuk proses <i>legal drafting</i> dan pengesahan
3	Pelaporan	15	Laporan dan draft final yang disampaikan ke Setditjen PSDKP
Jumlah		100	

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang sistem pemantauan SDKP. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 5 ini sebesar Rp225.000.000 dengan realisasi sebesar Rp224.161.105 atau sebesar 99,63%.

SASARAN KEGIATAN 3

TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP YANG EFEKTIF

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif” diukur dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

6 Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli

Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Pesawat Patroli agar terwujudnya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif. Indeks Kinerja Operasi Pesawat Patroli terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Persentase Jumlah Kapal yang di Validasi;
6. Persentase Operasi di Wilayah WPPNRI yang Rawan dan IUUF yang tinggi KIA (WPPNRI 571, 711, 716, 717);
7. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap pemantauan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Kawasan Konservasi;
8. Dukungan Kegiatan Pesawat Patroli terhadap Patroli Terkoordinasi Regional, Nasional dan Internasional;
9. Jumlah Dukungan kegiatan lainnya (Misi SAR, Kemanusiaan, Dukungan Pimpinan & MKP).

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 6 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	-	-	-	-	-	-	92	95,46	103,76%	93	98,72	106,15%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 98,72 dengan persentase capaian sebesar 106,15%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 3,16.



Gambar 5 Ilustrasi Operasi Pesawat Patroli

Peningkatan capaian dikarenakan pada tahun ini kegiatan operasi pesawat patroli telah mencapai target operasi sebagaimana telah ditetapkan. Target tersebut mencakup jumlah kapal perikanan yang dipantau, coverage area pengawasan, capaian hari operasi, tindak lanjut atas target operasi yang diberikan, jumlah kapal yang divalidasi, dukungan pemantauan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan konservasi, dan dukungan terhadap patroli terkoordinasi baik nasional maupun regional. Capaian ini mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan telah tercapai dengan maksimal. Hal ini tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan selama periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. IKU ini tidak terdapat target Renstra tahun 2020-2024.

Selama periode operasi Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 31 (tiga puluh satu) periode operasi. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 150 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain: Pesawat Maritime Patrol Aircraft MPA ATR 42-300 PK-YRE dan Pesawat Milik Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Kementerian Perhubungan. Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas dilautantara lain:

1. Periode I : Operasi Mandiri.
2. Periode I-A : KP. Orca 03, KP dan Hiu Macan Tutul 02
3. Periode II : Operasi Mandiri.
4. Periode II-A : KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Paus 01, KP. Orca 04, KP. Hiu 02 dan KP. Hiu 05.
5. Periode III : Operasi Mandiri
6. Periode III-A : KP. Orca 03, KP. HMT 02 dan KP. HIU 15
7. Periode III-B&C : Operasi Mandiri
8. Periode III-D : Operasi Mandiri
9. Periode IV : Operasi Mandiri
10. Periode IV-A : Operasi Mandiri
11. Periode V : KP. Orca 01, KN. Pulau Nipah Cape Sorel Vessel
12. Periode V-A : Operasi Mandiri
13. Periode V-B : Operasi Mandiri
14. Periode VI : KP. Hiu Macan Tutul 02
15. Periode VI- A : Operasi Mandiri
16. Periode VII : KP. ORCA 03 KP, HIU MACAN 05
17. Periode VII-A : Operasi Mandiri
18. Periode VII-B : KP. ORCA 02, KP. HIU 08
19. Periode VIII : KP. Paus 01
20. Periode VIII-A : KP. ORCA 02
21. Periode IX : Operasi Mandiri
22. Periode X : KP. HIU 11, Unsur SAREX (Helicopter AS139 Malaysia)
23. Periode X-A : Operasi Mandiri
24. Periode X-B : Operasi Mandiri
25. Periode XI : Operasi Mandiri
26. Periode XI-A : Operasi Mandiri
27. Periode XI-B : Operasi Mandiri
28. Periode XI-C : Operasi Mandiri
29. Periode XI-D : Operasi Mandiri
30. Periode XII : Operasi Mandiri
31. Periode XII-A : Operasi Mandiri

Adapun hasil operasi terintegrasi antara unsur pesawat patroli udara dengan kapal pengawas perikanan sampai dengan Desember 2023 ditabulasikan pada lampiran. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Responsif terhadap realisasi penggunaan pesawat udara harian sehingga dapat menyesuaikan volume harian penggunaan jam operasi.
2. Pergerakan pesawat udara dilaksanakan pada wilayah-wilayah prioritas dengan indikasi kerawanan sedang dan tinggi serta menambah target operasi pengawasan kelautan yang berada pada wilayah-wilayah yang berisikan dengan pengawasan perikanan sehingga meningkatkan capaian operasi;

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 6 ini sebesar

Rp42.410.000.000,00 dan sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp42.232.093.510,00 atau 99,58% dari alokasi anggaran.

7 Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasi Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan sebanyak 9 variabel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Tabel 10. Rincian capaian IKU 7 Direktorat POA Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	86,72	88,24	101,75	86,75	90,68	104,53	85	91,57	107,73	87,6	95,4	108,9%	89	95,4	107,19%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 95,4 dengan persentase capaian sebesar 108,9%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 3,87 dari yang sebelumnya sebesar 91,57. Kenaikan capaian ini dipengaruhi oleh banyaknya Kapal Pengawas yang mencapai komponen target utama kapal perikanan diperiksa, yakni sebanyak 6 Kapal Pengawas pada tahun 2023 dibandingkan 3 Kapal Pengawas pada tahun 2022. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya pembinaan yang dilakukan periode bulanan secara langsung oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada. Adapun target pada Renstra 2020-2024 adalah indeks 89. Hingga tahun 2023, capaian IKU 7 masih sesuai dengan menuju target Renstra 2020-2024



Gambar 6 Kegiatan Menghentikan, Memeriksa dan Menahan (henrikhan) oleh Kapal Pengawas

Selama periode Tahun 2023 untuk mendukung capaian IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas telah melaksanakan Operasi Mandiri Kapal Pengawas dengan jumlah hari operasi mandiri 10 Kapal Pengawas sebanyak 827 hari operasi dengan rata-rata hari operasi setiap kapal pengawas sebanyak 82,7 hari operasi.

Tabel 11. Hasil Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Ditjen PSDKP sampai dengan Tahun 2023

NO	NAMA KAPAL PENGAWAS	HARI OPS	DIPERIKSA			DITANGKAP		
			KII	KIA	JML	KII	KIA	JML
1	KP. ORCA 01	117	151	5	156	31	5	36
2	KP. ORCA 02	85	167	1	168	3	1	4
3	KP. ORCA 03	91	291	1	292	5	1	6
4	KP. ORCA 04	78	71	0	71	3	0	3
5	KP. ORCA 05	81	242	0	242	7	0	7
6	KP. ORCA 06	47	202	0	202	5	0	5
7	KP. HIU MACAN TUTUL 01	44	81	0	81	2	0	2
8	KP. HIU MACAN TUTUL 02	77	161	0	161	1	0	1
9	KP. PAUS 01	97	262	0	262	20	0	20
10	KP. AKAR BAHAR 01	110	2	0	2	0	0	0
JUMLAH TOTAL		827	1630	7	1637	77	7	84

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian operasi kapal pengawas;
2. Menyusun Rencana Operasi (RO) secara cermat berdasarkan sumber data yang tersedia.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 7 ini sebesar Rp195.369.661.000,00 dan sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp195.253.301.466,00 atau 99,94% dari total pagu.

8 Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas

Indikator ini digunakan untuk mengukur pemenuhan kebutuhan logistik kapal pengawas dalam mendukung operasi pengawasan SDKP. Logistik dimaksud meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personel. Logistik kapal terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas, sementara itu logistik personel terdiri dari : Bahan Makanan, Air Tawar, Alat-alat Pelayanan (ATK dan Bahan Komputer), dan senjata api. Capaian tahun 2022, 2023 dan target akhir Renstra 2024 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 8 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100%		

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pada Tahun 2023 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 capaian relatif sama. Namun demikian secara target tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10%. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2020-2024. Adapun rincian capaian setiap komponen adalah sebagai berikut

Tabel 13. Rincian Komponen IKU 8 Periode Tahun 2023

No	Komponen	Target	Realisasi	%
1	Pemenuhan Kebutuhan BBM (30%)	30%	30%	100
2	Pemenuhan Kebutuhan Pelumas (20%)	20%	20%	100

No	Komponen	Target	Realisasi	%
3	Pemenuhan Kebutuhan Bahan Makanan AKP (25%)	25%	25%	100
4	Pemenuhan Kebutuhan Air Tawar (15%)	15%	15%	100
5	Pemenuhan Kebutuhan Alat Pelayanan (5%)	5%	5%	100
6	Pemenuhan Kebutuhan Senjata Api (5%)	5%	5%	100
Total Nilai		100	100	100

Kegiatan pada tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengisian bahan bakar sesuai dengan jadwal pengajuan bbm kapal pengawas, melaksanakan pemenuhan bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat - alat pelayanan dan pelaporan senjata api tepat waktu sesuai dengan periode triwulanan yang telah di tetapkan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kapal pengawas terkait pelaksana pekerjaan secara berkala terkait pengisian bbm melalui aplikasi SIGOTIK maupun secara manual, bahan makan/natura, air bersih, minyak pelumas, alat-alat pelayanan dan pemenuhan senjata api;
3. Melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan pihak pertamina baik pusat maupun UPT PSDKP;
4. Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Logistik.

Keberhasilan mencapai target IKU pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Komitmen dari Direktur Pemantauan dan Operasi Armada dalam memaksimalkan ketersediaan logistik Kapal Pengawas;
2. Penyusunan, implementasi, dan pemantauan manajemen risiko; dan
3. Optimalisasi penggunaan Sistem Pengendalian Logistik (SIGOTIK).

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 8 ini sebesar Rp195.369.661.000,00 dan sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp195.253.301.466,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

9 Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas

Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (AKP) merupakan ukuran kesiapan ASN AKP (Kelas I – IV) berdasarkan kualifikasi pendidikan, sertifikat keahlian pelaut, sertifikat keterampilan pelaut, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan (MCU), dan psikotest pemegang senjata api, dalam melaksanakan tugas sesuai jenjang Jabatan dan Kelas Kapal Negara. Rincian capaian IKU 9 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 9 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	93,76	133,94%		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian kinerja tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu **Indeks 93,76** dari target **Indeks 70** dengan persentase capaian 133,94%. Adapun tidak ada target pada tahun 2022 dan Renstra 2024 karena IKU ini merupakan inisiatif baru di tahun 2023.

Berdasarkan data di atas, terlihat capaian melampaui target yang ditetapkan karena beberapa upaya yang dilakukan oleh Direktorat POA selama tahun 2023 sebagai berikut :

1. Optimalisasi anggaran dan item pelatihan sertifikasi keterampilan pelaut bagi Awak Kapal Pengawas (AKP) yang di fokuskan pada pemenuhan persyaratan sesuai sertifikasi keterampilan pelaut sesuai Keputusan MenPAN-RB nomor 656 tahun 2023 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Semula terdapat 5 kegiatan sertifikasi yaitu terdiri dari MFA, AFF, SCRB, SSO dan GMDSS dengan jumlah peserta 125 Orang, direvisi menjadi 6 kegiatan sertifikasi yaitu MFA, AFF, SCRB, SSO, SAT dan MC dengan jumlah peserta bertambah menjadi 304 Orang AKP.
2. Terdapat revisi anggaran peningkatan keahlian kepelautan dari ANKAPIN/ATKAPIN II ke ANKAPIN/ATKAPIN I sebanyak 23 Orang Awak Kapal Pengawas.
3. Melaksanakan pelatihan/sertifikasi keahlian dan keterampilan AKP, Medical Cek Up dan Psykotes AKP sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan;
4. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap AKP secara rutin sesuai dengan rencana kerja;
5. Menyusun dokumen manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan Pengawakan.

Adapun rincian capaian setiap komponen pembentuk IKU 9 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Komponen penilaian Kesiapan Awak kapal pengawas

NO	ITEM PENILAIAN	BOBOT PENGUKURAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Pendidikan	50,00	49,46
2	Sertifikat Keahlian Pelaut	25,00	24,86

NO	ITEM PENILAIAN	BOBOT PENGUKURAN CAPAIAN	CAPAIAN
3	Sertifikat Keterampilan Pelaut	10,00	5,41
4	Pemeriksaan Kesehatan (MCU)	5,00	4,81
5	Psikotest Pemegang Senjata Api	10,00	9,22
TOTAL CAPAIAN		100,00	93,76

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 9 ini sebesar Rp195.369.661.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp195.253.301.466,00 atau 99,94% dari alokasi anggaran.

10 Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP

Persentase Penyelesaian rancangan kebijakan pemerintah di bidang Pengawasan dan Logistik pada Tahun yaitu pada tahun 2023 ini Kelompok Pengawasan dan Logistik menyusun Peraturan Direktur Jenderal PSDKP terkait Pola Karier Awak Kapal Pengawas lingkup Direktorat POA dimana sampai dengan akhir tahun 2023 telah memasuki tahap Pengajuan ke Setditjen PSDKP.

Peraturan Direktur Jenderal ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menentukan arah dan karier setiap Awak Kapal Pengawas dalam meningkatnya kinerja Awak Kapal pengawak.

Rincian capaian IKU 10 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 10 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP	-	-	-	100	100	100%	100	120	120%	100	100	100%	-	-

Pada tahun 2023, capaian IKU "Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Pengawasan SDKP Lingkup Direktorat POA" ditargetkan sebesar 100%. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Tahun 2023 yaitu 100% melalui penyelesaian Draft Perdirjen terkait Pola Karier Awak Kapal Pengawas. Pada tahun sebelumnya, realisasi

capaian adalah sebesar 120%. Adapun penurunan 20% terjadi karena IKU penyusunan NSPK terbagi kedalam beberapa IKU. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2024. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang awak kapal pengawas. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.
2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran Tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 10 ini sebesar Rp225.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 224.161.105 atau sebesar 99,63%.

SASARAN KEGIATAN 4

TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

11 Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan

Indikator Kinerja “Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan” IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase penyelesaian jumlah armada dan fasilitas pendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dibangun di tahun berjalan.

Pada tahun 2023 terdapat Pengadaan sebanyak 2 (dua) unit Kapal Pengawas Perikanan kelas II yang dilakukan *Multi Years Contract* (MYC) Tahun anggaran 2022-2023. Untuk Progres Pembangunan Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan Kelas II (MYC) yaitu Kapal Pengawas Kalautan dan Perikanan Barakuda 01 dan Kapal Pengawas Kalautan dan Perikanan Barakuda 02. Rincian capaian IKU 11 Direktorat POA periode Tahun 2023 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 11 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan	-	-	-	-	-	-	55	55,29	100,53	100%	100%	100%	-	-

Indikator “Persentase Penyelesaian Pembangunan Sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II” merupakan indikator baru pada tahun 2023 sehingga realisasi tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun dibandingkan jika dibandingkan capaian IKU tahun 2022,

IKU ini ditahun 2023 merupakan penyelesaian kontrak MYC sehingga mengalami peningkatan.

langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat mencapai target tersebut diatas, antara lain:

1. Melakukan rapat koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan;
2. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara langsung di lapangan (galangan) dengan didampingi tim desain BRIN, tim Itjen KKP, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya;
3. Mengkonsultasikan permasalahan yang terjadi kepada tim itjen KKP serta pihak terkait dan cepat melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang terjadi;
4. PPK memberikan surat instruksi yang diperlukan kepada penyedia;
5. Melakukan open management dengan melibatkan Kejaksaan RI, Bareskrim Polri, BPKP, Itjen KKP, LKPP dan pihak terkait lainnya.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 11 ini sebesar Rp206.169.061.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp206.130.558.695,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran.

12 Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan

Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan sehingga dapat dinyatakan Laik Operasional berdasarkan laporan hasil survey yang dilakukan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang menyatakan Laik Operasional atau Tidak Laik Operasional. Adapun capaian indeks kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah sebagai berikut :

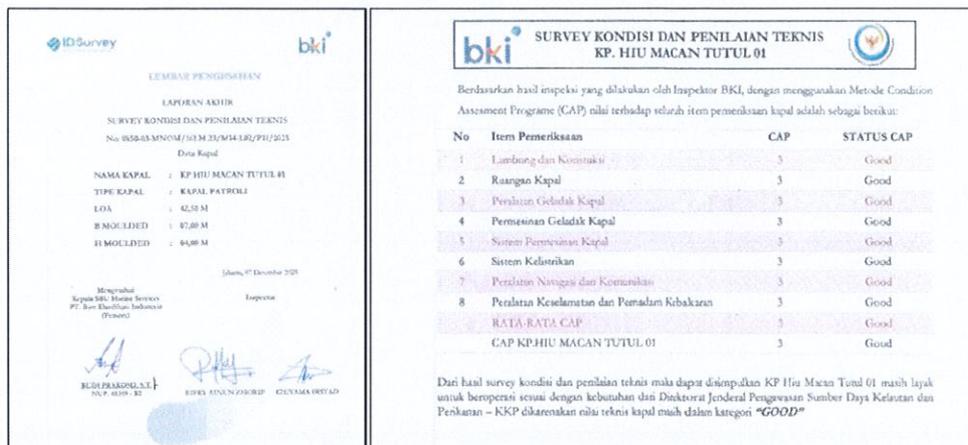
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU 12 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100%		

Berdasarkan tabel di atas, realisasi capaian pada tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja sebesar 100% di atas diperoleh berdasarkan Laporan Survey Kondisi dan Penilaian Teknis oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) terhadap kapal pengawas yang dikelola oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Survey yang dilakukan menggunakan metode Condition Assesment Programe (CAP), yaitu program penilaian kondisi kapal, baik lambung, permesinan, maupun sistem operasinya dimana hasil penilaian dari kondisi kapal tersebut akan disajikan dalam bentuk CAP Grading dengan skala 1 sampai dengan 4 dimana skor tertinggi yaitu 4 (empat) dengan predikat excellent. Realisasi tidak dapat dibandingkan karena tahun sebelumnya karena IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2023. Adapun hasil penilaian (survey) terhadap Kapal Pengawas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Hasil Penilaian (Survey) BKI

No	Nama Kapal	Hasil Penilaian	CAP Grading
1	Akar Bahar 01	Good	3
2	Paus 01	Good	3
3	Hiu Macan Tutul 01	Good	3
4	Hiu Macan Tutul 01	Good	3
5	Orca 01	Good	3
6	Orca 02	Good	3
7	Orca 03	Good	3
8	Orca 04	Good	3



Gambar 7 Pengesahan dan Hasil Penilaian oleh BKI

Keberhasilan dalam mencapai target tersebut tidak lepas dari beberapa hal yang dilakukan oleh Direktorat POA diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun jadwal perawatan dan pemeliharaan kapal pengawas yang terdiri dari perawatan pencegahan, perawatan prediktif, dan perawatan darurat secara efisien

- dan berkesinambungan;
- 2) Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas dengan pelaksana pekerjaan secara berkala;
 - 3) Menyusun dokumen manajemen risiko, mengimplementasikan, dan melakukan pemantauan risiko terhadap kegiatan perawatan;
 - 4) Menurunkan tim supervisi kegiatan perawatan secara berkala untuk melakukan pemantauan hasil perawatan dan memvalidasi detail pekerjaan di lapangan; dan
 - 5) Senantiasa berkonsultasi dengan APIP terkait pelaksanaan dan monitoring perawatan kapal pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 12 ini sebesar Rp31.273.330.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp31.262.170.902,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.

13 Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan

Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP adalah sebuah ukuran untuk mengukur kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang dituangkan dalam sebuah laporan supervisi. Pengukuran dilakukan berdasarkan kegiatan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan SDKP. Supervisi dilaksanakan secara daring dan/atau kunjungan langsung ke lokasi dengan tujuan untuk memonitor dan mengevaluasi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PSDKP.

Sarana Pengawasan SDKP yang dinilai meliputi : Kapal Pengawas Kelas III sebanyak 12 unit, Kapal Pengawas Kelas IV sebanyak 10 unit dan Kapal Pengawas Kelas VI sebanyak 87 unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat). Penyelesaian Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP meliputi perawatan pencegahan, perawatan prediktif dan perawatan darurat. Capaian Nilai Supervisi Penyelesaian Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan adalah sebagai berikut :

Tabel 20 Rincian Pemeliharaan Sarana Pengawasan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
	Nilai supervisi penyelesaian pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100%	-

Realisasi IKU 13 pada tahun 2023 adalah nilai 80 dari target nilai 80 sehingga capaian pada

tahun 2023 adalah sebesar 100%. Adapun capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 serta Renstra Tahun 2020-2024 karena IKU tersebut merupakan IKU baru di tahun 2023. Nilai capaian pada tahun 2023, didapatkan dari jumlah dokumen laporan supervisi pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 21 Rincian Pemeliharaan Sarana Pengawasan

Nama Armada	Jumlah	Prosentase	Capaian	Nilai
Kapal Pengawas	22	70	22	70
Speedboat Pengawas	69	30	22	10
TOTAL				80

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai target adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan jadwal supervisi yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan;
2. Koordinasi yang baik dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kapal Pengawas; dan
3. Metode pelaksanaan yang efektif dan efisien.
4. Melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP secara berkala dan rutin.

14 Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP

Nilai supervisi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kegiatan supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP di lingkungan Ditjen PSDKP. Supervisi penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP adalah penilaian kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi. Prasarana pengawasan SDKP sesuai dengan Perdirjen PSDKP nomor 10/DJP SDKP/2020 tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan SDKP terbagi menjadi dua jenis yaitu prasarana pengawasan SDKP utama dan pendukung.

Pembangunan dilaksanakan oleh UPT Ditjen PSDKP dan disupervisi oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selaku pembina teknis kegiatan. Penilaian kegiatan Perencanaan Teknis didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Perencana yang terdiri dari Gambar Teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKSS) dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Penilaian kegiatan Pelaksanaan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Penyedia Jasa Konstruksi yang terdiri dari laporan kegiatan pembangunan, shop drawing, jadwal kerja/kurva S, as built drawing. Penilaian kegiatan Pengawasan Konstruksi didasarkan pada penilaian terhadap dokumen yang disusun oleh Konsultan Pengawas yang terdiri dari laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan. Pada Tahun 2023, dilaksanakan pembangunan prasarana pada 4 (empat) UPT Ditjen PSDKP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22 Rincian Pembangunan Prasarana di UPT

No	Prasarana	Pelaksana	Nama Kegiatan	Nilai Supervisi	
A	Pos Pengawas/ Kantor	1	Pangkalan PSDKP Bitung	Pembangunan Pos Pengawasan Satwas PSDKP Makasar	80
		2	Stasiun PSDKP Belawan	Renovasi Pos Pengawasan Stasiun PSDKP Belawan	80
		3	Stasiun PSDKP Kupang	Pembangunan Pos Pengawasan Wilker PSDKP Maumere/Sikka	80
B	Prasarana Pengawasan SDKP Pendukung	4	Stasiun SDKP Cilacap	Prasarana Pengawasan SDKP Pendukung : 1. Pembangunan Pagar Satwas SDKP Pati 2. Pembangunan Pos Jaga Satwas SDKP Pati 3. Pembangunan Gerbang Stasiun PSDKP Cilacap	80

Nilai 80 berasal dari ketersediaan Gambar teknis, RAB, RKSS, TKDN, Shop Drawing, Kurva S, Laporan Mingguan, dan Laporan Bulanan. Nilai Supervisi penyelesaian dibandingkan dengan target terlihat pada tabel berikut :

Tabel 23 Target dan realisasi IKU-14 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	100%	-	-

Pada tahun 2023, diperoleh Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP sebesar 80 dari target 80 sehingga diperoleh capaian sebesar 100%. Adapun capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 serta Renstra tahun 2020-2024 karena IKU tersebut merupakan inisiatif baru di tahun 2023.

Keberhasilan dalam mencapai target IKU 14, didukung oleh beberapa strategi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan UPT selaku pelaksana kegiatan, baik melalui surat, pertemuan, dan supervisi secara langsung di lapangan;

2. Ikut memberi masukan kepada konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas apabila diperlukan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP selama pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan monitoring dan pengendalian Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP secara berkala.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 14 ini sebesar Rp500.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp495.699.504,00 atau 99,96% dari alokasi anggaran.

15 Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator ini merupakan inovasi pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung program peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7/2021, Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Pada tahun 2023, Direktorat POA menghasilkan 3 (tiga inovasi) pada unit kerja, yaitu SPRING (*Ship Monitoring Patrol Vessel Plan Maintenance System*), ORCA (*Operation Report of Fisheries Patrol Vessel Connected with data Analysis*), dan RAPID Dashboard Pokmaswas.

Tabel 24 Target dan realisasi IKU-15 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	3	300%		

Berdasarkan tabel diatas, IKU tersebut dilakukan perubahan nama pada tahun 2023 yang sebelumnya “Unit yang menerapkan Inovasi Pelayanan Publik”. Capaian IKU “Jumlah Inovasi yang dihasilkan” ditargetkan sebesar 1 pada akhir tahun 2023. Capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 300% berdasarkan jumlah inovasi yang dihasilkan. Hal ini meningkat 200% dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra PSDKP 2020-2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam ide/gagasan baru untuk selalu membuat inovasi tahunan agar kinerja menjadi lebih baik dari sebelumnya; dan
2. Melakukan rapat internal untuk pelaksanaan pembuatan inovasi perubahan setiap tahunnya.
3. Melakukan tahapan-tahapan penunjang dalam menggali ide/gagasan agar sesuai dengan kebutuhan.

16 Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Persentase penyelesaian Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyelesaian Rancangan NSPK dengan jumlah target rancangan NSPK yang diselesaikan. Penyelesaian rancangan NSPK dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan. Rancangan NSPK bidang pembangunan serta perawatan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP merupakan seluruh rancangan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat POA yang siap ditindaklanjuti untuk proses legal drafting.

Tabel 25 Target dan realisasi IKU 16 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase penyelesaian rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	-	-	-	100	100	100%	100	120	120%	100	100	100%	--	-

Pada tahun 2023, telah diselesaikan rancangan NSPK pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana dengan realisasi 100% dari target 100% berupa Draft Rancangan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pendaftaran Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Adapun dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat penurunan sebesar 20%. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingginya komitmen Direktur POA dalam pemenuhan regulasi di bidang Prasarana dan

Sarana. Hal ini karena pimpinan sangat memahami pentingnya/urgensi keberadaan norma, standar, pedoman dan kriteria dalam menjamin operasional sistem pemantauan SDKP berjalan sesuai kaidah dan standar yang tinggi.

2. Penetapan target NSPK yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

Alokasi anggaran tahun 2023 untuk mendukung tercapainya IKU 16 ini sebesar Rp225.000.000 dan sampai dengan akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp 224.161.105 atau 99,63% dari alokasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK LINGKUP DITJEN PSDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama, yaitu:

17 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA

- Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.
- Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (IV) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.
- Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 26 Target dan Realisasi IKU 17 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 dengan persentase capaian sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak terdapat capaian karena IKU tersebut merupakan IKU baru di Tahun 2023. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Resiko lingkup Direktorat POA; dan
2. Pemantauan Pengendalian Manajemen Resiko yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

18 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Profesional ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- ◆ Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)
- ◆ Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:

Pejabat Struktural:

DIKLAT PIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) SEMINAR: Pernah ikut (Nilai10), tidak pernah (nilai0)

Pejabat Fungsional Tertentu:

DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0) DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)

Pejabat Fungsional Umum/ Staf:

DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)

ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20oj+Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
ASN Fungsional : (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
ASN Staff: (Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20oj+ Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)

Tabel 27 Target dan Realisasi IKU-18 Periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA	71	68,85	95,63%	73	74,3	101,78%	77	81,64	107,42%	78	91,23	116,96%	76	91,23	120,04%

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA” mencapai realisasi 91,23 dari target sebesar 78. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 9,59. Peningkatan ini disebabkan tingginya komitmen pegawai Dit. POA untuk mengikuti seminar dan workshop keahlian dan mengupload sertifikat yang didapat. Sementara itu, pada Renstra PSDKP 2020-2024 ditargetkan sebesar 76 persen pada tahun 2024. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020-2023, target pada tahun 2024 berpotensi untuk tercapai.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen Direktur POA sangat fokus dalam hal pemenuhan nilai Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat POA;
2. Kesadaran yang tinggi pegawai Dit POA dalam pengembangan diri yang dilakukan secara daring maupun luring; dan
3. Pemenuhan IP ASN yang menjadi prioritas oleh Direktur POA yang harus diselesaikan.

19 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Instansi pemerintah untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggung jawab terhadap kinerja atau hasil yang telah dicapai. Akuntabilitas Kinerja sebagai suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome. Dalam rangka evaluasi tingkat akuntabilitas, Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sementara Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/Daerah.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Tabel 28 Target dan realisasi IKU 19 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,5	87,75	109,01%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, nilai capaian IKU "Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA" sebesar 87,75 dari target sebesar 80,5 sehingga capaian adalah sebesar 109,01%. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada Tahun 2022, tidak terdapat capaian karena IKU tersebut merupakan IKU baru di Tahun 2023. Untuk target Renstra 2020-2024 juga tidak ada. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- ♦ Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian nilai rekonsiliasi kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada; dan
- ♦ Melakukan penilaian mandiri pada Lembar Kerja Evaluasi, dan memenuhi data dukung yang sudah ditetapkan.

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

IKU ini menunjukkan Persentase Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat POA berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 29 Target dan realisasi IKU 20 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	60	75,92	126,53%	65	80	123,08%	70	70	100%	75%	100%	133,33%	80	100%	125%

Berdasarkan tabel diatas, Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” bila dibandingkan dengan Tahun Tahun 2022 realisasi capaian mengalami peningkatan sebesar 33%. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen pimpinan untuk menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan dengan melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari rekomendasi yang ada.

Pada Tahun tahun 2023, capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan dengan realisasi 133% dari target. Untuk mencapai keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh arahan dari pimpinan untuk segera melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa memenuhi target dari “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan” untuk memastikan tidak terdapat temuan yang harus dilakukan proses berdasarkan laporan perhitungan hasil temuan Inspektorat Jenderal.

Tabel 30 Rincian Tindakanlanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

NO	NO SURAT	URAIAN TEMUAN	JUMLAH REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
				TUNTAS	PROSES	PENDING
1	R.285/ITJ.2/HP.470/XI/2022	Evaluasi Operasi Pesawat Patroli Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	1	1	-	-
2	R.196/ITJ.2/HP.380/VIII/2023	Reviu Pembayaran Tunggakan Sewa Pesawat Udara TA 2022 pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	1	1	-	-

21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Direktorat POA. Realisasi anggaran yang tinggi juga sejalan dengan tingginya capaian output Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Dalam rangka mencapai target realisasi anggaran, dilaksanakan aktivitas Pengendalian berupa:

- Memastikan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan sesuai dengan Kaidah;
- Memastikan Penyelesaian Kegiatan Kontraktual sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Memastikan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Akuntabel,
- dan Meminimalisir Deviasi halaman IV DIPA.

Tabel 31 Target dan realisasi IKU 21 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,4%	99,85%	100,45%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, IKU ini merupakan IKU baru di tahun 2023. Capaian IKU "Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat POA" ditargetkan sebesar 99,4 pada akhir tahun 2023. Pencapaian realisasi anggaran untuk periode Tahun 2023 adalah sebesar 99,85% sehingga capaian pada tahun 2023 adalah sebesar 100,45%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022 karena merupakan inisiatif baru. Sementara itu, target juga tidak terdapat pada Renstra 2020-2024.

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian atas kinerja tersebut dipengaruhi beberapa hal sebagai berikut:

- Komitmen Pimpinan/Direktur POA sangat fokus dalam hal capaian Persentase Realisasi Anggaran lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada;
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
- Membuat rencana penarikan dana serta proyeksi penyerapan.

22 Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Indikator ini merupakan IKU baru di Tahun 2023, Nilai Implementasi Program Budaya Kerja tingkat Ditjen PSDKP diperoleh dari:

- ♦ Rata-rata nilai LKE pelaksanaan Budaya Kerja Seluruh Satker Pusat (5 Satker) dan Satker UPT (14 Satker)
- ♦ Nilai LKE yang digunakan adalah nilai tanpa dikonversi ke persentase Target
- ♦ nilai Satker Pusat minimal 23 per triwulan
- ♦ Target nilai Satker UPT minimal 20,5 per triwulan

Tabel 32 Rincian target dan realisasi IKU-22 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	21	27,18	129%	21	28,03	133,48%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Nilai Implementasi Program Budaya Kerja” ditargetkan sebesar 21 pada akhir tahun 2023. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode Tahun 2023 yaitu 28,03 dengan persentase capaian 133,48%. Dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun 2022, terdapat kenaikan nilai sebesar 0,85. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra PSDKP 2020-2024 juga tidak ada.

Pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sesudah adanya penerapan program budaya kerja telah terjadi perubahan pola pikir dan cara kerja melalui budaya kerja yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi pada setiap area perubahan, karena terdapat lingkungan strategis yang berubah menghasilkan terobosan dalam melakukan kegiatan. Langkah implementasi 11 (sebelas) program budaya kerja pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada yang mendukung dalam pencapaian IKU Implementasi Budaya Kerja adalah:

- **Hasilkan Inovasi Satker (HIU)** : Melakukan asistensi untuk menghasilkan inovasi pada lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
- **Lima Menit Sebelum Jadwal Rapat** : Mencantumkan pada surat undangan agar

peserta hadir 5 (lima) menit sebelum rapat

- **Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R):** Melakukan internalisasi budaya 5R agar ruang kerja lebih rapih
- **Upayakan Data Terkini (UPDATE) :** Pada saat rapat pimpinan terdapat unit kerja yang menyampaikan paparan dengan menggunakan data pengawasan atau data penangkapan kapal ilegal yang periode lampau, maka dengan adanya program ini tiap pegawai telah melakukan usaha terkini untuk mendapatkan data yang UPDATE.
- **Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA) :** Pada saat kegiatan temu teknis aparat penegak hukum terdapat agenda yang belum rapi terjadwal, notulen dan pendokumentasian yang masih berantakan, dengan adanya program ORCA kegiatan menjadi lebih komprehensif melalui pencatatan dan pengarsipan notula.
- **Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT) :** Dalam pelaksanaan tugas adanya potensi untuk melakukan korupsi, menerima suap, menerima gratifikasi dan mengambil kebijakan yang bertentangan dengan hukum, maka dengan adanya program TAAT ini telah mewujudkan pegawai yang berintegritas tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga menjaga nama baik organisasi dan kepercayaan publik
- **Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA) :** Pada saat penyusunan anggaran terdapat kesan dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tidak sesuai ketentuan, maka dengan adanya program BARRAKUDA ini tiap pegawai telah merencanakan anggaran sesuai kaidah perencanaan dan penganggaran sehingga terjadi peningkatan kualitas DIPA dan meminimalisir temuan auditor.
- **ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK) :** Pada saat jam kerja terdapat pegawai yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak fokus, maka dengan adanya program APIK ini setiap pegawai telah bertanggungjawab dan mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaannya dengan meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu fokus kerjanya.
- **Menyelesaikan Tugas Dengan Tepat (MANTAP) :** Terdapat penyelesaian tugas oleh pegawai atau suatu unit kerja yang terlambat dan tidak tepat waktu, serta mempengaruhi kinerja unit kerja lain, maka dengan adanya program MANTAP ini maka telah tumbuh komitmen kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan diselesaikan secara tepat waktu.
- **Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS) :** Kurangnya kesadaran dalam memberi penghargaan dan apresiasi mengakibatkan motivasi dan hubungan sesama pegawai menjadi kurang optimal, maka dengan adanya program HARMONIS ini telah mendorong sikap saling menghargai dan apresiasi terhadap kontribusi kerja pegawai sekecil dan sesederhana apapun dalam pelaksanaan tugas. Terdapat apresiasi Sobat PILAR PSDKP bulanan dan tahunan.
- **Gelorkan Gerakan Hemat Energi (Go Green) :** Lingkungan kerja terdapat penggunaan energi yang boros, penggunaan kertas kerja yang banyak, penggunaan air minum dalam kemasan, maka dengan adanya program Go Green maka tiap pegawai telah timbul kesadaran untuk melakukan efisiensi dalam hal menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan peralatan kerja sebelum pulang, dan mengurangi penggunaan kertas dan tinta dalam memproses dokumen kerja.

23 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Indikator “Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf.

Tabel 33 Target dan realisasi IKU 23 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA	82,00	90,37	110,21%	84,00	98,79	117,61%	86,00	100,00	116,28%	92%	133%	145,57%	90,00	133%	147,78%

Berdasarkan tabel diatas, capaian periode Tahun 2023 sebesar 133,33% atau 144,57% dari target. Bila dibandingkan dengan Tahun 2022 capaian realisasi mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh keaktifan dan keikutsertaan seluruh pegawai untuk upload dokumen sesuai arahan pimpinan. Adapun realisasi juga telah tercapai berdasarkan target dalam Renstra 2024.

Adapun perbandingan dari nilai capaian IKU tersebut antar Eselon 2 lingkup Ditjen PSDKP ditabulasikan pada tabel berikut:

CAPAIAN NILAI MP DITJEN PSDKP TRIWULAN IV TAHUN 2023

Target 92%.

SATKER PUSAT

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4*)	Nilai Tahun 2023
SETDITJEN	97.78%	98.06%	105.90%	71.43%	93.29%
DIT POA	100.00%	100.00%	128.00%	133%	115.33%
DIT PPSDP	100.00%	95.00%	87.15%	112.50%	98.66%
DIT PPSDK	98.98%	100.00%	108.33%	125.00%	108.08%
DIT PP	100.00%	99.17%	91.38%	133.33%	105.97%

Ket: *)Nilai yang diinput ke KINERJAKU

SATKER UPT PSDKP

UNIT	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4*)	Nilai Tahun 2023
JAKARTA	100.00%	92.59%	100.00%	93.33%	96.48%
BITUNG	100.00%	92.59%	100.00%	88.33%	95.23%
LAMPULO	92.59%	94.81%	102.87%	121.67%	102.98%
BATAM	100.00%	92.59%	94.44%	133.33%	105.09%
BENOA	85.19%	100.00%	105.56%	116.67%	101.85%
TUAL	91.11%	99.26%	116.67%	125.00%	108.01%
BELAWAN	85.19%	100.00%	101.85%	123.33%	102.59%
PONTIANAK	97.04%	98.52%	93.52%	68.33%	89.35%
TARAKAN	100.00%	94.07%	100.00%	8.33%	75.60%
CILACAP	80.74%	100.00%	107.41%	108.33%	99.12%
KUPANG	73.33%	92.59%	122.22%	133.33%	105.37%
AMBON	82.22%	100.00%	94.44%	121.67%	99.58%
TAHUNA	98.52%	100.00%	122.22%	120.00%	110.19%
BIAK	91.11%	100.00%	96.30%	100.00%	96.85%

24

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- ◆ Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022; Tersedianya
- ◆ usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- ◆ Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017- 2019;
- ◆ Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- ◆ Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 34 Target dan realisasi IKU 24 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020			CAPAIAN 2021			CAPAIAN 2022			CAPAIAN 2023			RENSTRA	
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat POA	-	-	-	72,50	100,00	137,93%	75,00	100,00	133,33%	77,5	100,0	129,03%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 100% dari target 77,5% dengan persentase capaian sebesar 129,03%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian IKU 24 tetap 100%. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra 2020-2024

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN; dan
- Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin.

25 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Tahun 2023.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%);
- Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%);
- Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%); Kesesuaian
- tahap pelaksanaan (30%).

Tabel 35 Target dan realisasi IKU-25 periode Tahun 2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	RENSTRA
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------

	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	%
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat POA	-	-	-	72,50	93,39	128,81%	75,00	97,19	129,59%	77,5	93,48	120,62%	-	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi capaian pada Tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar Nilai 93,48 dari target Nilai 77,5 dengan persentase capaian sebesar 120,62%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 3,71. Penurunan disebabkan oleh keterlambatan penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan yang berada diluar kehendak dari Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sementara itu, tidak terdapat target pada Renstra tahun 2020-2024. Keberhasilan dalam mencapai target IKU pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Komitmen pimpinan untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- Rapat monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan; dan
- Penerapan Pantau PBJ berupa reminder dan monitoring PBJ sebagai inovasi pada lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. Realisasi Anggaran

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan akhir tahun 2023 telah melaksanakan 9 Rincian Output (RO) Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dalam DIPA Satker Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2023. Pagu Direktorat POA sebesar Rp 484.456.097.000 (empat ratus delapan puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi anggaran Direktorat POA Tahun Tahun 2023 sebesar Rp 483.721.298.962 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 99,85% dari Pagu anggaran

Tabel 36 Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Tahun Tahun 2023

KRO	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
2350.ACA	001 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) yang diterbitkan	2,750,000,000	2,740,694,144	99.66%
2350.AFA	001 - NSPK Pemantauan dan Operasi Armada	225,000,000	224,161,105	99.63%
2350.BKB	011 - Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan SDKP yang Dipantau	500,000,000	495,699,504	99.14%
2350.BKB	012 - Operasional Pembinaan POKMASWAS yang Dipantau	140,000,000	139,051,532	99.32%
2350.QHD	001 - Operasi Kapal Pengawas	195,369,661,000	195,253,301,466	99.94%
2350.QHD	002 - Operasi Pesawat Patroli	42,410,000,000	42,232,093,510	99.58%
2350.RAL	001 - Kapal Pengawas	206,369,061,000	206,130,558,695	99.88%
2350.RCG	001 - Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat	31,273,330,000	31,262,170,902	99.96%
2350.RDS	001 - Sistem Pemantauan SDKP Terintegrasi yang Operasional	5,419,045,000	5,359,702,316	98.90%
TOTAL		484.456.097.000	483,721,298,962	99,85%

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selalu berupaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2023, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dinilai cukup efektif dalam menggunakan sumber daya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi sebesar 111,15% (Kriteria: Sangat Memuaskan), sedangkan anggaran yang digunakan terelaisasi sebesar 99,85%.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melaksanakan beberapa hal antara lain: (1) memaksimalkan kinerja operasi melalui Pesawat Patroli Udara (*airborne surveillance*) untuk memberikan target operasi terverifikasi. Pola ini dikenal dengan istilah *intercept*. Pola ini memberikan target yang jelas kepada Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan di laut, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak kapal pengawas. (2) melakukan rapat-rapat koordinasi secara virtual sehingga mampu meminimalkan pengeluaran biaya. (3) mengurangi penggunaan kertas dan dokumen tercetak sehingga mampu mengurangi biaya operasional perkantoran.

C. Analisis Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada melaksanakan beberapa kegiatan dalam menunjang pencapaian kinerja di tahun 2023 :

- **Aspek Operasi Armada**
Berpartisipasi dalam kegiatan operasi bersama baik dalam dan luar negeri seperti Gannet Ausindo, Patkor Optima Malindo, Operasi Interdiksi BNN, Operasi Bersama Bakamla, Operasi Bersama Pengawasan dan Penindakan Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL), dll. Selain itu, pola operasi integrated surveillance system (ISS) mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasi.
- **Aspek Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP**
Melakukan koordinasi/pengendalian rutin dengan PT. Palindo Marine selaku penyedia, PT. Zatria Awan Consultant sebagai konsultan pengawas, PT. Biro Klasifikasi Indonesia sebagai badan klasifikasi, Inspektorat Jenderal KKP, tim desain Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan pihak terkait lainnya untuk membahas progres dan kendala serta solusinya selama pelaksanaan pekerjaan.
- **Aspek Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas**
Optimalisasi penggunaan teknologi dalam memenuhi dan melakukan monitoring penggunaan logistik kapal pengawas. Hal tersebut mampu meningkatkan efektifitas

dan efisiensi kegiatan.

- **Aspek Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP**
Pada tahun 2023, dilaksanakan penilaian kondisi sarana pengawasan SDKP oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) untuk mengetahui kualitas pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan. Selain itu, Port Engineer pada Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada mampu memberikan deteksi dini terkait kerusakan kapal pengawas dan berbagi ilmu pemeliharaan kapal pengawas secara tepat.
- **Aspek Sistem dan Informasi Intelijen SDKP**
Pengembangan sistem pemantauan SDKP secara berkesinambungan dan peningkatan pemahaman pengguna aplikasi melalui Bimtek dapat meningkatkan keandalan operasional sistem pemantauan SDKP dalam memberikan data dan informasi.
- **POA Virtual Class**
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada secara berkesinambungan melaksanakan POA Virtual Class berupa inhouse training secara daring maupun luring dalam rangka meningkatkan kapasitas personel serta sharing knowledge untuk meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Nilai capaian kinerja rata-rata Direktorat POA periode Tahun 2023 sebesar 111,15% dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja tersebut, yaitu sebesar Rp 483,721,298,962 (99,85%).
2. Jumlah Indikator Kinerja Direktorat POA tahun 2023 adalah sejumlah 25 indikator kinerja. Dari target 25 Indikator Kinerja tersebut, sejumlah 25 Indikator Kinerja tercapai di atas target.
3. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan nilai kinerja organisasi sebesar 2,03% dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan efektifitas dan efisiensi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam mencapai target kinerja yang diberikan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan analisis data yang disajikan pada Laporan Kinerja Direktorat POA tahun 2023, telah berjalan dalam rel yang benar. Hanya saja tentu masih perlu penyempurnaan pada masa yang akan datang. Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam rangka pelaksanaan penyusunan kinerja tahun 2024, yakni sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
Memastikan seluruh Indikator Kinerja lingkup Direktorat POA tercapai sesuai target yang ditetapkan.	Konsisten melakukan evaluasi secara berkala melibatkan penanggungjawab IKU pada level Tim Kerja lingkup Direktorat POA
Capaian IKU Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA perlu ditingkatkan.	Melakukan evaluasi pelaksanaan Bimtek Aplikasi SKAT tahun 2023 agar pencapaian kinerja tahun 2024 lebih maksimal.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (sebelum perubahan)



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

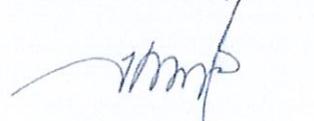
Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada



Pung Nugroho Saksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas (%)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (indeks)	80
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	3	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93
		4	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5	Persentase penyelesaian pembangunan sarana Pengawasan SDKP Kapal Pengawas Kelas II (%)	100
		6	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (%)	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	7	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80
		8	Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang pengawasan SDKP lingkup Direktorat POA (%)	100
		9	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
		10	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78
		11	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		12	Nilai rekonsiliasi kinerja lingkup Direktorat POA (Nilai)	90
		13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		14	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	15 Nilai implementasi program budaya Kerja (Nilai)	21
	16 Jumlah inovasi yang dihasilkan (inovasi)	1
	17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92%
	18 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5%
	19 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5%

Data Anggaran

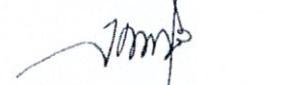
NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	494.674.299.000
	Total Anggaran	494.674.299.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan


Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada


Pung Nugroho/Saksono

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (sesudah perubahan)



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id/djpsdkp SUREL djtenosdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Pung Nugroho Saksono**

Jabatan : Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada

Pung Nugroho Saksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

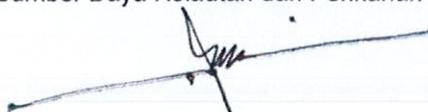
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Nilai supervisi pembinaan Pokmaswas (Nilai)	80
2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	2	Indeks pengelolaan sistem pemantauan dan Informasi Intelijen SDKP (indeks)	80
		3	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (%)	77
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Indeks)	80
		5	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Sistem Pemantauan SDKP (%)	100
		6	Indeks kinerja operasi pesawat patroli (indeks)	93
3	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	7	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87.6
		8	Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	100
		9	Indeks Kesiapan Awak Kapal Pengawas (Indeks)	70
		10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Operasi Armada Pengawasan SDKP (%)	100
4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	11	Persentase Prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		12	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Indeks)	100
		13	Nilai supervisi pemeliharaan dan perawatan Sarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80
		14	Nilai Supervisi Penyelesaian Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP (Nilai)	80
		15	Inovasi yang dihasilkan Bidang Pemantauan dan Operasi Armada (inovasi)	1
		16	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP (%)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	17 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Direktorat POA (%)	100
	18 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	78
	19 Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat POA (Nilai)	80.5
	20 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
	21 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat POA (%)	99.4
	22 Nilai implementasi program budaya Kerja (Nilai)	21
	23 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	92
	24 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat POA (%)	77,5
	25 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat POA (%)	77,5

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	484,456,097,000
SK 1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	
SK 1.2	Terselenggaranya sistem pemantauan SDKP yang akurat	
SK 1.3	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	
SK 1.4	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	
SK 1.5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat POA	
Total Anggaran		484,456,097,000

Jakarta, November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada



Pung Nugroho Saksono

Lampiran 3 Rincian Hasil Operasi Pesawat Patroli

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
I	9 - 10 Januari 2022	2	712	1934.4	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan kegiatan operasi patroli di wilayah WPPNRI 712 laut Jawa dengan hasil pemantauan ditemukan 1 (satu) unit kapal perikanan penampung dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif.
I-A	13 - 24 Januari 2022	11	711, 571, 572, 713, 712	111371.2	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> Validasi kepatuhan terhadap 7 unit Kapal Purse Seine, 2 unit Kapal Castnet dan 2 unit Kapal Gillnet dengan status transmitter pada saat pemantauan aktif Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Kepulauan Anambas, Gili Trawangan, dan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Mentawai
II	7-8 & 23-24 Februari 2023	4	712, 713	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
II-A	14 - 26 Februari 2023	10	711, 571, 572, 712, 713, 714	136630.4	KP. ORCA 03 KP. HIU	• Pada tanggal 15 Februari 2023, pesawat udara Air Surveillance dibayangi oleh

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
					MACAN TUTUL 02 KP. PAUS 01 KP. ORCA 04 KP. HIU 02 KP. HIU 05	<p>US Navy F-18 Hornet selama 20 menit di dalam Landas Kontinen Indonesia. Tindak lanjut dari kejadian ini telah dilaporkan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan kembali Kapal Bitumen Tanker Pengangkut Aspal (MV. AASHI) yang kandas di Perairan Nias oleh Direktur Jenderal PSDKP bersama dengan Tim Polsus PPSDK pada tanggal 25 Februari 2023. • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 571, 572, 712, 713, dan 714
III	5, 8-9 MARET 2023	3	712		Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar, aman dan terkendali
III-A	7-18 Maret 2023	10	43,84	111.731,2	KP. ORCA 03, KP. HIU	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
					MACAN TUTUL 02, KP. HIU 15	Perikanan di beberapa WPPNRI <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke Kapal Pengawas • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 716, 713, dan 712
III-B&C	12-14 Maret 2023	2	8,7	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
III-D	20 - 22 Maret 2023	3	11,69	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
IV	24 Maret - 12 April 2023	6	23,17	57.132,8	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 713, 714
IV-A	13 - 22 April 2023	9	712, 718, 715, 714	77.262.4	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi Kepatuhan SPKP Kapal Perikanan di beberapa WPPNRI • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 712, 718, 715, 714
V	29 - 30 April 2023 10 - 11 April 2023 16 - 20 April 2023	8	715, 711, 573, 714, 718	63396.8	KP. ORCA 01 KN. PULAU NIPAH CAPE SOREL VESSEL	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi kepatuhan terhadap SPKP terhadap 7 Unit KII, masing-masing 3 unit Kapal Castnet, dan 4 unit Kapal Purse Seine dengan status transmitter aktif pada saat pemantauan; • Telah dilakukan dukungan operasi GANNET - 7 AUSINDO; • Telah dilakukan Pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Laut Sawu; • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali; <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya; • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 573, 713, 714, dan 718.
V-A	8 - 9 Mei 2023	1	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
V-B	21 - 23 April 2023	3	573, 714, 718	28347.2	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 573, 714, 718 • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.
VI	5 - 14 Juni 2023	8	711, 713, 715, 716, 717, 718	91779.2	KP. HIU MACAN TUTUL 02	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terhadap 8 unit KII • Berdasarkan data hasil pemantauan telah dilakukan plotting bahwa Kapal Perikanan Asing asal Filipina masih berada diluar Batas ZEE Indonesia.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 711, 713, 716, 715, 717 dan 718.
VI-A	24 - 29 Juni 2023	4	713, 718	47488	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) terhadap 5 unit KII • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<p>dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 713, 714, dan 718.
VII	30 Juni, 5 - 7, 13, 16, 18-20 Juli 2023	10	711, 573, 715, 714, 718	121672	KP. ORCA 03 KP. HIU MACAN 05	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi Kapal Ikan Asing (KIA) ke Kapal Pengawas • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) • Pemantauan Kawasan Konservasi Nasional TWP Laut Banda tidak ditemukan adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<ul style="list-style-type: none"> • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 713, 714, dan 718.
VII-A	8 & 10 Juli 2023	2	572	6467.2	Operasi Mandiri	Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 572
VII-B	21 - 26 Juli 2023	4	571	43140.8	KP. ORCA 02 KP. HIU 08	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian posisi Kapal Ikan ke Kapal Pengawas • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya. • Pendataan data sebaran kapal perikanan di WPPNRI 571
VIII	7 - 12 Agustus 2023	6	714, 718	60736	KP. PAUS 01	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan SPKP terhadap 2 Kapal Gill Net > 30 GT yaitu KM. Risco Putra 4 dan KM. Kurnia III dengan status aktif. • Penerusan informasi keberadaan aktivitas Transshipment kepada KP. Paus 01 dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan adhock

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						<p>terhadap KM. Pasifik dan KM. Welcome Sir pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan duga langgar melakukan alih muatan / Transhipment dari kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan dukungan kegiatan pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
VIII-A	14 - 16 Agustus 2023	3	712, 711	36297.6	KP. ORCA 02	<ul style="list-style-type: none"> • Validasi ketaatan SPKP terhadap 4 Kapal Cast Net >30 GT dengan nama lambung KM. Wijaya Abadi, KM. Tri Jaya Maju, KM. Restu Illahi Jaya, dan KM. Abadi Sukses dengan status transmitter aktif; • Penerusan hasil pemantauan kepada KP. ORCA 02 untuk ditindaklanjuti berdasarkan data hasil pemantauan telah dilakukan plotting bahwa terdapat Kapal Perikanan Asing asal Vietnam yang berada di wilayah ZEE Indonesia; • Pendataan data sebaran

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						kapal perikanan dan alat bantu penangkapan ikan di WPPNRI 712 dan 711 sebagai bahan operasi berikutnya.
IX	11 September 2023	1	712	-	Operasi Mandiri	Telah dilaksanakan dukungan kegiatan Pimpinan dengan lancar aman dan terkendali
X	2 - 14 Oktober 2023	9	711	60.678,4	KP. HIU 11 Unsur SAREX (Helicopter AS139 Malaysia)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian informasi posisi Kapal Ikan Asing (KIA) dan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam • Dilakukan uji petik/validasi kepatuhan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) • Dukungan Misi kegiatan SAREX Indonesia - Malaysia di Area Perbatasan • Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya.
X-A	27 - 29 Oktober 2023	3	713, 712	26174.4	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Kapal Ikan Asing di WPPNRI 712 Laut Jawa dan WPPNRI 713 Selat Makasar. • Validasi Kepatuhan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
						• Pemantauan Kapal Ikan Indonesia <30 GT izin daerah yang beroperasi di atas 12 NM
X-B	31 November 2023	1	572	-	Operasi Mandiri	Dukungan Kunjungan Kerja Kedinasan MKP
XI	3 - 4 November 2023 9 - 14 November 2023	7	712, 573	30248	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 712 Laut Jawa, WPPNRI 573 Selatan Jawa dan WPPNRI 572 Perairan Barat Sumatera. • Validasi Kepatuhan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP • Pemantauan Kapal Ikan Indonesia <30 GT izin daerah yang beroperasi di atas 12 NM • Dukungan kerja pimpinan
XI-A	10 & 20 November 2023	2	712, 572	-	Operasi Mandiri	Dukungan Kunjungan Kerja Kedinasan MKP
XI-B	22 November 2023	1	717	-	Operasi Mandiri	Dukungan Kunjungan Kerja Kedinasan MKP
XI-C	22 November 2023	3	717	-	Operasi Mandiri	Dukungan Kunjungan Kerja Kedinasan MKP

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Operasi
XI-D	23 November 2023	1	717	-	Operasi Mandiri	Dukungan Kunjungan Kerja Kedinasan MKP
XII	19 - 20, 28 November 2023 6 - 9 Desember 2023	6	711, 712, 713	7401.6	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Kapal Ikan Indonesia >30GT Pemantauan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dukungan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan
XII-A	15, 17, 20 Desember 2023	3	712, 713	8057.6	Operasi Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> Operasional Kapal Ikan Indonesia >30GT Pemantauan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dukungan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai Nota Dinas Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 2671/SJ.6/TU.310/XII/2023 Tanggal 14 Desember 2023 hal Permohonan Sinergi Pengawasan Udara.
Total Hari Operasi		150	Total Coverage Area (NM²)	1.127.947,2		

Lampiran 4 Daftar kegiatan pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
1	KP. Orca 01			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembersihan Tritip KP Orca 01
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Accu Genset Harbour Dan Emergensi KP. Orca 01
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pompa Pendingin Cold Storage KP. Orca 01
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 M Dalam Rangka Pengadaan AC Panasonic Type CU-YN9WKJ KP. Orca 01	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembelian Regulator C9 Sebanyak 2 Pcs Untuk KP. Orca 01
		Analisis teknis dan Trouble shooting error code Main Engine Port dan Starboard		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 01 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
2	KP. Orca 02			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembersihan Tritip Kapal Pengawas Orca 02
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas Dalam Rangka Penggantian ACCU Genset Harbour, Genset Emergensi dan Seareader KP Orca 02
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Pembelian Mesin Cuci KP. Orca 02	
			Pengadaan Peralatan Pendukung Perawatan Dalam Rangka Pembelian Kunci Momen Britool HVT 5000	
				Perawatan Darurat KP. 60 M Dalam Rangka Penggantian Sparepart Rectifier LSA46 Auxiliary Engine C9 KP. Orca 02
		Pembersihan Generator Auxiliary Engine Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Port dan Starboard		
		Servis Main Engine Starboard Penggantian Gasket Cylinder Head dan Adjust Valve		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 02 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
3	KP. Orca 03	Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Harbour		
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliary Engine Starboard dan Auxiliary Engine Port		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Analisis Teknis Main Engine Port dan Main Engine Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Penggantian Pompa Air Kotor/ Celup KP. Orca 03
		Pengecekan Power Supply battery charger dan gear box Main Engine Port side dan starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 03 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
4	KP. Orca 04			Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Service Exhaust Manifold ME Kapal Pengawas Orca 04
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Juli 2023		
		Fumigasi Kapal Pengawas Orca 04		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 M Dalam Rangka Perbaikan Flexibel Exhaust AE II KP. Orca 04
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 60 Meter Dalam Rangka Perbaikan Hydro Pump KP. ORCA 04
		Analisis Teknis dan Servis ETC B Bank Main Engine Port Side dan Adjust valve Main Engine Port Side dan Starboard		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Orca 04 (Type 60 Meter) Bulan September 2023		
5	KP. HMT 01		Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
6	KP. HMT 02	Service Perlengkapan Navigasi dalam Rangka Perbaikan Radar CPU JRC JMA X Band KP. Hiu Macan Tutul 01		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01 (Type 42 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Pengecekan dan Analisis Teknis Main Engine Starboard dan Main Engine Port		
		Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Starboard dan Auxiliari Engine Port		
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
				Perawatan Darurat Kapal Pengawas 42 Meter Dalam Rangka Perbaikan Dan Penggantian Kompresor Air Conditioner (AC) Central KP. Hiu Macan Tutul 02
	Service Perlengkapan Navigasi dalam Rangka Perbaikan Radar CPU JRC JMA X Band KP. Hiu Macan Tutul 02			
	Pengecekan dan Analisis Teknis Main Engine Starboard			

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
7	KP. Paus 01	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 02 (Type 42 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Top Overhaul Auxiliari Engine Starboard		
	Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Harbour			
	Pengecekan dan Analisis Teknis Auxiliari Engine Port			
	Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Paus 01 (Type 42 Meter) Bulan September 2023			
		Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine		

NO	KP	Jenis Target Perawatan		
		Preventif	Prediktif	Darurat
8	KP. Akar Bahar 01	Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan Juli 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
		Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan Agustus 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	
			Pengadaan Accu Kering KP. Akar Bahar 01	
		Belanja Perawatan dan Pemeliharaan Rutin Bulanan Kapal Pengawas Akar Bahar 01 (Type 14 Meter) Bulan September 2023		
			Pemakaian Suku Cadang Main Engine dan Auxiliary Engine	